



Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Komunitas Sahabat UMKM Pamulang di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan

*Socialization of Social Security Agency for Sahabat UMKM Pamulang in Pamulang
District, South Tangerang*

Yozar Putra Jaya¹, Achmad Rifa'i², Dian Priastiwi³, Sari⁴, Syofia Sofatunisa Ramdayani⁵

yozar.putra@ecampus.ut.ac.id

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Terbuka

Info Article

| Submitted: 5 June 2025 | Revised: 22 June 2025 | Accepted: 27 June 2025

How to cite: Yozar Putra Jaya, etc., "Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Komunitas Sahabat UMKM Pamulang di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan", *Sinesia : Journal of Community Service*, Vol. 2, No. 1, May, 2025, P. 82-92.

ABSTRACT

The Social Security Administering Body for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) plays a strategic role in providing protection for workers in the informal sector, including micro, small, and medium enterprises (MSMEs) that are vulnerable to work-related risks. However, the level of understanding and participation of MSME actors in this program remains low. This community service activity aims to increase literacy and awareness among MSME actors within the Sahabat UMKM Pamulang Community (SUP) in the Pamulang District, South Tangerang City, regarding the BPJS Ketenagakerjaan program. The implementation method was carried out through interactive socialization that included material presentation, group discussions, and direct question-and-answer sessions with participants. The material presented covered the introduction of the Old Age Security (JHT), Work Accident Security (JKK), Death Security (JKM) programs, and the procedures for registering as an independent participant. The results of this activity showed an increase in the interest of MSME actors to become independent participants in BPJS Ketenagakerjaan. This activity demonstrates that a communicative and community-based socialization approach is effective in increasing social security literacy among MSME actors. It is expected that follow-up activities can be conducted regularly with the support of related institutions to expand the coverage of employment protection for the informal sector.

Keyword: BPJS Ketenagakerjaan, Informal workers, MSME, Socialization, Social protection

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan bagi pekerja sektor informal. Salah satu kelompok yang tergolong dalam hal tersebut yaitu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap risiko kerja. Namun, tingkat pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM terhadap program ini masih rendah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran pelaku UMKM dalam Komunitas Sahabat UMKM Pamulang (SUP) di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi interaktif yang mencakup pemaparan materi, diskusi kelompok, serta sesi tanya jawab langsung dengan peserta. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan prosedur pendaftaran sebagai peserta mandiri. Hasil kegiatan ini menunjukkan terjadi peningkatan minat pelaku UMKM untuk menjadi peserta mandiri BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang komunikatif dan berbasis komunitas, efektif dalam meningkatkan literasi jaminan sosial di kalangan pelaku UMKM. Diharapkan kegiatan lanjutan dapat dilakukan secara berkala dengan dukungan instansi terkait untuk memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan bagi sektor informal.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, pekerja informal, perlindungan sosial, sosialisasi, UMKM

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sentral dalam menopang struktur ekonomi nasional. Selain berkontribusi signifikan terhadap



pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga menjadi tulang punggung dalam penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Saputro et al., 2024). Namun, di balik besarnya kontribusi tersebut, terdapat ironi yang terjadi. Sebagian besar pelaku UMKM masih tergolong dalam kategori pekerja sektor informal yang belum mendapatkan perlindungan kerja secara memadai.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2024 mencatat bahwa lebih dari 59% dari total 142,18 juta angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor informal (Anggita et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan, mayoritas pelaku UMKM beroperasi tanpa perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, maupun ketidakpastian penghasilan di masa tua (Saputro et al., 2024). Situasi ini menggambarkan ketimpangan antara peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi dan minimnya jaminan sosial yang mereka peroleh.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi seluruh tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal, pemerintah mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaga ini mengelola lima program jaminan sosial utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (Aseandi, 2024). Secara normatif, seluruh pekerja Indonesia berhak menjadi peserta, termasuk mereka yang bekerja secara mandiri. Namun dalam praktiknya, partisipasi pelaku UMKM terhadap program ini masih sangat rendah (Orias, 2023).

Temuan ini juga tercermin dalam kegiatan observasi dan diskusi yang dilakukan bersama Komunitas Sahabat UMKM Pamulang (SUP) di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Sebagian besar pelaku UMKM dalam komunitas tersebut tidak mengetahui secara pasti perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Bahkan, banyak yang belum menyadari bahwa sebagai pekerja bukan penerima upah (BPU), mereka memiliki hak untuk mendaftar secara mandiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Minimnya akses informasi, rendahnya literasi hukum, serta tidak adanya pendampingan teknis menjadi faktor yang menghambat kesadaran dan partisipasi mereka dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan (Noor et al., 2023).

Ketiadaan perlindungan sosial bagi pelaku UMKM tidak hanya meningkatkan kerentanan ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004

Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam konteks ini, pembangunan kesadaran kolektif mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sangat mendesak, terutama di tengah tingginya risiko kerja dan ketidakpastian usaha (Dewantoro et al., 2020).

Ketidaktahuan ini berdampak pada tingginya kerentanan pelaku UMKM terhadap risiko sosial dan ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian mendadak, atau kehilangan pendapatan di hari tua. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar sistem jaminan sosial nasional. Dalam konteks inilah, upaya untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan kerja menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan (Dewantoro et al., 2020).

Salah satu strategi yang dinilai efektif untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui pendekatan sosialisasi yang langsung menasar komunitas pelaku UMKM. Kegiatan sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan agar pelaku usaha mampu memahami hak-haknya dan mengambil keputusan secara mandiri untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Melalui metode komunikasi partisipatif, diskusi interaktif, dan pendampingan pendaftaran digital, pelaku UMKM dapat didorong untuk membangun kesadaran terhadap perlindungan jangka panjang yang mereka butuhkan (Ningrum & Santoso, 2023).

Berdasarkan urgensi tersebut, kegiatan *Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Komunitas Sahabat UMKM Pamulang* dilaksanakan sebagai bagian dari kontribusi akademik dalam memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pelaku usaha informal. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan partisipasi para pelaku UMKM dalam sistem perlindungan sosial, tetapi juga menjadi model pendekatan sosial yang aplikatif dan dapat direplikasi di berbagai komunitas lain yang menghadapi persoalan serupa

Metode Penelitian

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi BPJS ketenagakerjaan pada komunitas SUP dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi program BPJS ketenagakerjaan pada komunitas SUP yaitu metode presentasi yang dilanjutkan dengan tanya jawab (Rifa'i et al., 2024). Presentasi digunakan untuk menjelaskan program-program yang dimiliki oleh BPJS ketenagakerjaan. Sementara itu, sesi tanya jawab disediakan di akhir presentasi untuk memastikan peserta memahami materi yang disampaikan. Dalam menjalankan kegiatan sosialisasi ini, terdapat dua tahapan yang dilakukan, yaitu persiapan dan pelaksanaan.

Pada tahap persiapan, terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Langkah-langkah tersebut meliputi koordinasi awal dan penyusunan materi sosialisasi. Penyelenggara kegiatan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain komunitas Sahabat UMKM Pamulang, pihak Kecamatan Pamulang, serta instansi BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memperoleh dukungan dan menjalin kerja sama yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, penyusunan materi sosialisasi mencakup penyiapan bahan presentasi yang akan disampaikan kepada peserta. Materi tersebut berisi informasi mengenai berbagai program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, manfaat yang dapat diperoleh peserta, prosedur pendaftaran, serta hak-hak yang dimiliki oleh peserta program (Orias, 2023).

Pada tahap pelaksanaan, berbagai pendekatan digunakan untuk menyampaikan materi secara efektif kepada peserta sosialisasi. Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi oleh narasumber, yang disampaikan secara sistematis dan jelas melalui media presentasi. Materi mencakup penjelasan menyeluruh mengenai program-program BPJS Ketenagakerjaan, manfaat yang ditawarkan, prosedur pendaftaran, serta hak-hak peserta. Setelah sesi penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, dimana peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta menyampaikan pandangan atau pengalaman terkait perlindungan ketenagakerjaan (Saputro et al., 2024).

Hasil dan pembahasan

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi UMKM penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui manfaat dan kewajiban terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka dan pekerjanya rentan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan, sakit, atau kehilangan pekerjaan tanpa jaminan perlindungan (Putri Rini Situmeang et al., 2023). Sosialisasi yang efektif dapat mendorong kepesertaan aktif, menciptakan iklim kerja yang lebih aman dan produktif, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Selain itu, kepatuhan terhadap program ini juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan hukum yang akan berdampak positif pada citra dan keberlangsungan UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Komunitas Sahabat UMKM Pamulang di Aula Kecamatan Pamulang

1.1 Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan pada Komunitas SUP

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada UMKM tidak hanya penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup pekerja dan keberlanjutan usaha itu sendiri. Selain tahapan teknis, pendekatan persuasif juga perlu diperhatikan, terutama karena banyak pelaku UMKM yang memiliki anggapan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah beban tambahan. Oleh karena itu, dalam sosialisasi juga harus ditekankan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang mampu mengurangi risiko finansial akibat kecelakaan kerja, kematian, atau kehilangan pekerjaan (Sausan & Nirawati, 2024).

Di sisi lain, peran teknologi dan inovasi komunikasi juga sangat penting untuk menjangkau UMKM secara lebih luas, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil. Melalui penggunaan aplikasi digital, konten video edukatif, dan platform media sosial, pesan sosialisasi dapat disampaikan secara lebih menarik dan mudah diakses. Di samping itu, kolaborasi dengan pelaku UMKM yang telah menjadi peserta aktif juga dapat menjadi sarana testimoni atau role model untuk meyakinkan UMKM lainnya. Dengan pendekatan yang menyeluruh, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dapat mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih aman, sejahtera, dan berdaya saing.

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk komunitas **SUP** merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha kecil terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Komunitas ini terdiri dari pelaku usaha yang aktif dan berkembang, sehingga menjadi sasaran yang potensial dalam menyebarkan informasi mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, JKK, JKM, JHT, dan JKP. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar, pelatihan, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang menghadirkan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan serta praktisi UMKM yang sudah merasakan manfaat program tersebut.

Melalui pendekatan yang komunikatif dan berbasis kebutuhan pelaku UMKM lokal, diharapkan anggota komunitas SUP dapat memahami bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap risiko kerja yang bisa terjadi kapan saja. Sosialisasi juga perlu mengedepankan kemudahan pendaftaran, besaran iuran yang terjangkau, dan fleksibilitas program untuk UMKM. Dengan melibatkan tokoh lokal atau penggerak komunitas sebagai duta sosialisasi, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan diaplikasikan. Keberhasilan kegiatan ini akan memperkuat jaringan usaha yang lebih tangguh dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja di lingkungan komunitas SUP (Sutrisno, 2020).

1.2 Manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi UMKM

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi UMKM sangat besar, baik bagi pelaku usaha maupun para pekerjanya. Pertama, program ini memberikan **perlindungan terhadap risiko kerja**, seperti kecelakaan saat bekerja atau dalam perjalanan menuju dan pulang dari tempat kerja, melalui **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**. Jika terjadi kecelakaan, biaya pengobatan hingga santunan akan ditanggung sepenuhnya, sehingga tidak membebani pelaku usaha secara finansial. Kedua, melalui **JKM**, pekerja yang meninggal dunia, baik karena kecelakaan kerja maupun sebab lain, akan mendapatkan santunan bagi ahli waris, sebagai bentuk kepastian dan tanggung jawab sosial dari pemberi kerja.

Ketiga, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan **JHT** berupa tabungan yang bisa diambil saat pekerja pensiun, berhenti bekerja, atau mengalami PHK, sehingga menciptakan rasa aman untuk masa depan. Keempat, dengan adanya **JKP**, pekerja yang terkena PHK berhak mendapatkan uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja, yang sangat membantu dalam masa transisi. Bagi pelaku UMKM sendiri, kepesertaan dalam program ini bisa meningkatkan **citra profesional dan kepercayaan konsumen**, karena menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja. Selain itu, kepatuhan terhadap program ini juga bisa menjadi **syarat administratif dalam mengakses bantuan pemerintah, perizinan usaha, atau kerja sama dengan lembaga keuangan**. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga sebagai investasi sosial dan ekonomi bagi keberlanjutan UMKM (Waliyuddin Zakiy & Azizaton Nafi, 2023).

1.3 Respons UMKM terhadap BPJS Ketenagakerjaan

Respons UMKM terhadap BPJS Ketenagakerjaan cenderung beragam, tergantung pada tingkat pemahaman, kondisi usaha, dan persepsi terhadap manfaat program tersebut. Sebagian pelaku UMKM merespons **positif**, terutama mereka yang sudah menyadari pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja. Mereka melihat BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk tanggung jawab

sosial sekaligus investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan rasa aman dan loyalitas pekerja, serta membantu menjaga kelangsungan usaha jika terjadi risiko kerja. Namun, tidak sedikit pula pelaku UMKM yang masih memberikan **respons negatif atau ragu-ragu**. Beberapa alasan yang sering muncul adalah keterbatasan informasi, anggapan bahwa iuran menjadi beban tambahan, atau ketidaktahuan bahwa program ini juga bisa diikuti oleh pelaku UMKM.

Selain itu, pelaku UMKM yang belum memiliki pekerja tetap atau yang bergerak di sektor informal sering kali merasa program ini kurang relevan bagi mereka. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih edukatif dan persuasif dalam sosialisasi. Diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai fleksibilitas iuran, kemudahan pendaftaran, dan kebermanfaatan program dalam jangka panjang. Jika didukung dengan strategi komunikasi yang tepat dan testimoni nyata dari UMKM yang sudah merasakan manfaatnya, respons terhadap BPJS Ketenagakerjaan di kalangan UMKM cenderung akan semakin positif dan partisipatif. Selain beragamnya respons pelaku UMKM terhadap BPJS Ketenagakerjaan, faktor-faktor eksternal seperti **dukungan pemerintah daerah, ketersediaan informasi yang mudah diakses, dan peran komunitas UMKM lokal** juga sangat memengaruhi tingkat partisipasi dan penerimaan program ini (Putri et al., 2024).

UMKM yang tergabung dalam komunitas atau asosiasi biasanya lebih mudah dijangkau untuk mendapatkan informasi dan bimbingan teknis mengenai pendaftaran, pembayaran iuran, serta klaim manfaat, dibandingkan dengan UMKM yang bergerak secara individual. Oleh karena itu, kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah setempat, dan komunitas seperti *SUP* menjadi sangat penting dalam membangun ekosistem sosialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, respons UMKM juga bisa meningkat jika program BPJS Ketenagakerjaan dikaitkan dengan **insentif non-finansial**, seperti pelatihan kewirausahaan, sertifikasi usaha, atau akses ke program pembiayaan mikro yang mensyaratkan kepesertaan jaminan sosial. Hal ini akan menambah nilai guna langsung bagi pelaku usaha.

Respons positif juga biasanya muncul ketika ada **pendampingan intensif**, terutama bagi UMKM pemula yang belum memahami mekanisme administrasi. Kemudahan layanan melalui kanal digital seperti aplikasi *mobile* atau layanan pesan singkat juga turut meningkatkan minat, terutama di kalangan pelaku UMKM muda dan melek teknologi. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan respons positif UMKM terhadap BPJS Ketenagakerjaan, diperlukan pendekatan yang tidak hanya informatif tetapi juga partisipatif dan solutif. Hal serupa juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ningrum & Santoso (2023), mereka menemukan bahwa sosialisasi partisipatif

mendorong kesadaran dan brand awareness UMKM di Surabaya, terutama ketika melibatkan pelaku usaha sebagai narasumber testimoni. Disampaing itu, edukasi yang berkelanjutan, penyederhanaan prosedur, dan dukungan nyata dari berbagai pihak turut diperlukan agar dapat mendorong UMKM untuk tidak sekadar ikut, tetapi juga memahami dan merasakan manfaat nyata dari program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penutup

Kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Komunitas Sahabat UMKM Pamulang menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui pendekatan interaktif dan berbasis komunitas, para peserta mulai memahami manfaat serta prosedur kepesertaan secara mandiri. Hal ini tercermin dari meningkatnya minat peserta untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah kegiatan berlangsung. Temuan ini menegaskan bahwa penyampaian informasi yang bersifat komunikatif, partisipatif, dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal mampu menjangkau pelaku usaha mikro yang sebelumnya belum terakses oleh program perlindungan sosial pemerintah. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya berperan sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan bagi UMKM dalam memperkuat ketahanan usaha mereka terhadap risiko kerja dan sosial ekonomi.

Saran

Diperlukan kesinambungan program sosialisasi dengan cakupan yang lebih luas dan berkelanjutan agar dampaknya dapat dirasakan secara menyeluruh di kalangan pelaku UMKM. Disarankan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dan instansi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan komunitas lokal seperti Sahabat UMKM Pamulang, baik dalam bentuk pendampingan teknis, pelatihan digitalisasi layanan, maupun pemberian insentif partisipatif bagi peserta baru. Selain itu, integrasi sosialisasi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya seperti akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan sertifikasi usaha dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan minat dan kepesertaan pelaku UMKM dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap stabilitas usaha dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor informal.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka atas dukungan dan pendanaan yang telah diberikan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Anggita, A. V., Destina, P., & Rusnandari, C. R. (2024). Pengaruh Sosialisasi, Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Informal . *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis* , 9(2), 827–839.
- Aseandi, R. (2024). SOSIALISASI MANFAAT BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN KERJA PADA MASYARAKAT PEKAN SAWAH KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT . *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* , 5(1), 1661–1665. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25434>
- Dewantoro, R., Rini, E. S., & Fadli. (2020). STRATEGI BAURAN PEMASARAN JASA PROGRAM PERISAI UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH KEPERSERTAAN DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN UTARA . *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3(1), 724–737.
- Ningrum, K. H., & Santoso, B. (2023). Sosialisasi Sekunder BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Dalam Peningkatan Brand Awareness Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Medokan Ayu Surabaya. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, 2(2), 112–127. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v2i2.1912>
- Noor, G. P., Endaryono, B. T., Rifai, N., & Susilo, H. (2023). *Pelatihan dan Penyuluhan kepada Pelaku UMKM untuk Memahami Manfaat dan Prosedur Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.*
- Orias, M. (2023). SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS KETENAGAKERJAAN) BAGI MASYARAKAT DESA PLOSO KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO. *JURNAL PADI (Pengabdian Masyarakat Dosen Indonesia)*, 6(1), 21–26. <https://doi.org/10.51836/jpadi.v6i1.534>
- Putri, P. D. S., Putra P, K. W. S., & Lasmi, N. W. (2024). Optimalisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal: Studi Pengabdian di Kabupaten Bangli. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3).
- Putri Rini Situmeang, Lia Ulvi Miranata Putri, & Ayu Pebrianti. (2023). Implementasi Perlindungan Hak Pekerja terkait Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 270–285. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v4i1.670>
- Rifa'i, A., Sari, Ramdayani, S. S., & Jaya, Y. (2024). Sosialisasi Inflasi dan Investasi: Meningkatkan Literasi Keuangan Anggota Rumah Hijrah Pontianak. *Gandhi*, 3(3), 68–75. <https://doi.org/10.33830/g-jpm.v3i3.10582>
- Saputro, I. N., Alviana, N., Setyaningsih, R., Bernike, S., Misbahuddin, M. H., Hasanah, M. U., Suprayitno, F. A., Soleh, F. M., Nugroho, P. I. N., Alzena, E. R. A., Putri, F. A., & Afriza, T. (2024). Pentingnya Pencatatan Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM Desa Kuwiran . *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 826–831. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.6738>
- Sausan, V. Z., & Nirawati, L. (2024). Sosialisasi Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan Guna Tingkatkan Kesadaran Tenaga Kerja UMKM di Surabaya. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6, 2543. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i6.1563>

- Sutrisno, H. (2020). PENGARUH BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA. *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 78–84. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v4i1.670>
- Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , Sekretariat Negara (2011).
- Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional , Sekretariat Negara (2004).
- Waliyuddin Zakiy, M., & Azizatul Nafi, B. (2023). Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada UMKM Di Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya oleh BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri*, 1(2), 2964–2795. <https://doi.org/10.556442>

Biografi Singkat Penulis



Penulis bernama Yozar Putra Jaya adalah lulusan S1 program studi Ekonomi Syariah pada Institut Pertanian Bogor kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Ilmu Ekonomi pada Universitas yang sama yaitu Institut Pertanian Bogor. Saat ini penulis merupakan seorang dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Terbuka.



Penulis bernama Achmad Rifa'i adalah lulusan S1 Program Studi Pendidikan Ekonomi pada Universitas Lampung kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Sains Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis merupakan seorang dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Terbuka.



Penulis bernama Dian Priastiwi adalah lulusan S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Universitas Diponegoro kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Diponegoro Saat ini penulis merupakan seorang dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Terbuka.



Penulis bernama Sari adalah lulusan S1 Program Studi Pendidikan Ekonomi pada Universitas Tanjungpura kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Airlangga. Saat ini penulis merupakan seorang dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Terbuka.



Penulis bernama Syofia Sofatunisa Ramdayani adalah lulusan S1 Program Studi Pendidikan Ekonomi pada Universitas Pendidikan Indonesia kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Ilmu Ekonomi Terapan di Universitas Padjajaran. Saat ini penulis merupakan seorang dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Terbuka.